

# MEMETAKAN NARASI ISLAMISME DI MEDAN, SUMATERA UTARA: INVESTIGASI TERHADAP POLA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN TERHADAP RADIKALISME

**Faisal Nurdin Idris**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Email: faisal.nurdinjkt@gmail.com*

## **Abstract**

*In this study, I examine the constructing narratives of Islamism, patterns in the transmission of narratives and patterns in the acceptance of narratives in Medan, North Sumatra. Based on in-depth interview and library research, I found that the constructing narratives of Islamism include hate against Jewish and Christian, the rejection against Ahmadiyah and deviant beliefs, and dislike against Liberal Islam Network and Syiah. In my findings, radical narratives show binary opposition that Islam is incompatible with democracy, the implementation of Islamic law, the Islamic state against the existing systems in Indonesia. Extreme narratives are expressed in the support for the use of violence. However, terrorist narratives are largely not welcomed by respondents. Regarding the patterns in the transmission of narratives, my findings found that there are various channels of media and communication including print and electronic media, interpersonal relations, and Islamic learning (pengajian) and Islamic study circles (halaqah). Concerning the patterns of acceptance, it includes the alertness about the world disorder and the existing systems in the society, different identities based upon religious sentiment, and frustration at slowness of change.*

*Keywords: narratives of Islamism, radicalism, identity politics, transmission*

## **Abstrak**

Dalam studi ini, saya menginvestigasi tiga hal yaitu konstruksi narasi Islamisme, pola penyebaran narasi, dan pola penerimaan narasi di wilayah Medan Sumatera Utara. Dengan memadukan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, saya menemukan bahwa konstruksi narasi Islamisme mencakup kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani, penolakan terhadap Ahmadiyah dan aliran sesat dan ketidaksukaan terhadap Islam liberal dan Syiah. Selanjutnya narasi radikalisme memperlihatkan narasi oposisi *binari* bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi, penerapan syariah Islam dan negara Islam *versus* sistem yang berlaku saat ini di Indonesia. Narasi ekstremisme diwujudkan dengan penggunaan kekerasan. Secara umum, narasi terorisme tidak terlalu mendapatkan tempat pada masyarakat Medan. Pola penyebaran narasi meliputi media elektronik and cetak, hubungan interpersonal, dan pengajian dan *halaqah*. Adapun pola penerimaan narasi berupa kesadaran tentang kekacauan dunia dan sistem yang berlaku di masyarakat, perbedaan identitas yang berlandaskan sentimen agama, dan frustasi terhadap lambannya perubahan.

Kata kunci: narasi Islamisme, radikalime, politik identitas, transmisi

## **1. Pendahuluan**

Ditinjau dari setting sejarah, sosial, politik, budaya dan agama, masyarakat Sumatera Utara (SUMUT) adalah masyarakat yang multi etnik dan agama. Secara demografis, jumlah penduduk di Sumatera Utara berdasarkan Sensus 2010 yaitu 12,982,204 jiwa di mana jumlah kelompok

menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir seimbang, 6,483,354 dan 6,498,850. Adapun komposisi umat beragama berdasarkan data PROPEDA (Program Pembangunan Daerah) Provinsi SUMUT 2001-2005 yang dikutip dalam Nasution (2004:22) yaitu pemeluk Islam (63,21 %), Kristen Protestan (28,04 %), Katolik (5 %), Budha (3,32 %), Hindu (0,19%), dan agama lainnya (0,24 %).

Menurut Ansori Yamamah (Wawancara, 23 Juli 2013), komposisi pemeluk agama Islam di Sumatera Utara diperkirakan sekitar 65 persen dari total populasi yang ini juga dapat menyiratkan adanya pertarungan agama dalam kontestasi sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat lokal.

Kelompok etnik asli di SUMUT terdiri dari Melayu, Karo, Pakpak, Simalungun, Dairi, Batak Toba, Angkola, Mandailing, Natal, Pesisir, dan Nias (Pelly, 2004:74; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1976:28). Secara geografis, ada juga yang menyebut bahwa etnik Batak terdiri dari lima etnik utama yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Karo, Pak-Pak dan Simalungun. Masing-masing etnik tersebut memiliki teritori (kawasan budaya) sendiri yang dapat bertindihan dengan batas-batas wilayah administratif pemerintahan daerah. Secara umum, kelompok etnik pendatang di SUMUT dan Medan mayoritas berasal dari Jawa, Cina, Minangkabau, Aceh, dan Sunda (Ansori Yamamah, wawancara, 23 Juli 2013).

Menurut antropolog Usman Pelly, sebagaimana juga pada masyarakat kota Medan, pada masyarakat SUMUT dikenal istilah konfederasi kelompok-kelompok etnik dengan tidak adanya kelompok budaya yang dominan. Mengutip dari Bruner (1974) dan Barth (1969), Pelly melihat absennya kelompok etnis dominan di kota Medan dan SUMUT tidak saja menyebabkan munculnya sikap “sungkan” dalam pergaulan antar kelompok etnis, tetapi juga mendorong kecenderungan untuk mempertahankan eksistensi dan batas-batas antara satu etnik dengan lainnya (Pelly, 2004:71-75). Argumen ini menarik dan penting untuk memberikan kerangka analisis bagaimana narasi Islamisme beresonansi dengan aspek budaya lokal di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Medan.

Sebagai *locus* dalam penelitian ini, kota Medan mendapat perhatian besar dari publik seiring dengan terjadinya serangkaian aktivitas

teroris pasca penggerebekan kamp pelatihan teroris di Aceh pada tahun 2010. Kejadian perampokan bank CIMB Niaga di Medan bulan Agustus 2010 dan serangan terhadap sebuah Polsek di Hampan Perak di luar kota Medan, serta penembakan yang mengakibatkan kematian tiga orang anggota Polisi pada bulan September memperlihatkan bahwa daerah Medan menjadi salah satu tempat di mana para pelarian teroris melakukan mobilisasi untuk mencari hunian baru dan membentuk kelompok baru pasca terbongkarnya kamp pelatihan teroris di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Laporan International Crisis Group (ICG) menyebutkan adanya pertalian yang erat antara jaringan dan kelompok atau sel teroris di Medan, Solo, dan Poso (International Crisis Group (ICG), 2012:1).

Medan yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara juga terekam sebagai daerah di mana jaringan radikalisme Islam dan terorisme tumbuh termasuk juga beberapa kejadian serangan terorisme (Hasan et al., 2012:38). Misalnya aktifitas terorisme tersebut dapat dilihat dari serangan yang menasar beberapa gereja di kota Medan Sumatera Utara pada bulan Mei 2000 (Fealy & Borgu, 2005:27). Di tahun yang sama juga, serangan yang menargetkan gereja di Medan, Pematang dan Siantar di Sumatera Utara beserta dan juga di beberapa kota lain di Indonesia terjadi pada malam Natal tanggal 24 Desember 2000 (Chalk et al., 2009:98). Fakta ini memperlihatkan bahwa Medan menjadi daerah di mana aktifitas terorisme dan jaringannya perlu mendapat perhatian serius.

Selain rentannya Medan sebagai tempat lalu lintas para teroris, sensitivitas isu agama yang dibalut oleh sentimen primordial tidaklah dapat dianggap remeh. Direktur Bimbingan Masyarakat Polisi Daerah (Dir Bimas Polda) Sumatera Utara (Wawancara, 28 Juli 2013) menggarisbawahi kerawanan isu ini di Sumatera Utara (SUMUT). Di samping itu, radikalisme dan ekstremisme juga hal yang

perlu diwaspadai di Sumatera Utara seperti dalam kasus penyerangan terhadap kegiatan keagamaan. Adanya kerentanan terhadap radikalisme dan ekstremisme berikutan tindakan kekerasan di Medan SUMUT dapat dilihat dalam aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekitar 300-an warga terhadap Thariqat Satariyah Sahid ketika sedang melaksanakan pengajian di Kelurahan Began Deli, Kecamatan Medan Belawan (Hasani, 2009:70).

Pemaparan di atas menunjukkan adanya kerentanan wilayah Medan, secara khusus dan Sumatera secara umum, terhadap ancaman dan infiltrasi dari radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Sayangnya belum banyak informasi mengenai aspek kognitif yang menjadi dasar munculnya ekspresi radikalisme dan kemudian berujung kepada tindakan terorisme di Indonesia, khususnya di wilayah Medan dan Sumatera Utara. Di sinilah kajian narasi menjadi relevan dan penting untuk menangkap bagaimana aspek kognitif, imajinasi, ideologis dan konstruksi pemahaman radikal dalam individu bergerak dan beresonansi dengan politik identitas dan pandangan sekitarnya (*world view*) termasuk situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui proses *mediated communication*.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memetakan konstruksi narasi Islamisme di masyarakat wilayah Medan, Sumatera Utara.<sup>1</sup> Dua hal penting yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu apa saja konstruksi narasi Islamisme yang berkembang di masyarakat Medan dan bagaimana narasi-narasi Islamisme itu tersebar dan diterima oleh masyarakat? Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) secara *face-to-face* terhadap informan yang terseleksi berdasarkan kelompok dan organisasi yang dianggap potensial untuk berperan sebagai agensi dalam penyebaran Islamisme di Medan Sumatera Utara. Narasumber atau informan yang relevan

dan terkait dengan fokus penelitian ini juga diminta pandangannya. Di samping melakukan wawancara, teknik pengumpulan data lainnya mencakup observasi, *life story*, dan telaah sumber atau studi pustaka.

## 2. Kerangka Pemikiran

Sebagai sebuah konsep, Islamisme (*Islamism*) didefinisikan dan dimaknai secara beragam. Tidak adanya konsensus di antara para ilmuwan mengenai terminologi dari Islamisme membuat adanya beragam konseptualisasi mengenai Islamisme. Bahkan karakteristik utama yang sering dinisbatkan kepada Islamisme seperti '*Islamic fundamentalism*', '*political Islam*', '*Islamic radicalism*' or '*radical Islamism*' belum dapat memberikan kejelasan akan terminologi Islamisme. Namun menurut Mehdi Mozaffari (2007:18-19), kejadian serangan teroris 11 September mengakibatkan masifnya penggunaan terminologi Islamisme. Peristiwa tersebut juga menandai pergeseran definisi Islamisme pada abad 19 yang dimaknai seperti *Christianisme*, berubah menjadi konsep yang independen. Jika sebelumnya, dua ilmuwan Islamologis Perancis Olivier Roy dan Gilles Kepel menggunakan '*political Islam*' dan '*fundamentalist Islam*', saat ini keduanya lebih menyukai penggunaan kata Islamisme.

Mozaffari (2007:21) kemudian mendefinisikan Islamisme sebagai "*a religious ideology with a holistic interpretation of Islam whose final aim is the conquest of the world by all means.*" Dengan definisi ini, ada empat elemen yang saling terkait yaitu: ideology keagamaan (*religious ideology*), penafsiran holistik tentang Islam (*holistic interpretation of Islam*), penaklukan dunia (*conquest of the world*), dan penggunaan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Untuk keperluan dalam studi ini, konsep Islamisme yang digunakan mengacu pada

ekspresi politik-keagamaan yang mengandung unsur manipulatif yang menjangkau empat spektrum utama yaitu militansi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Kategori militansi ditandai dengan sikap intoleran dan anti-sistem. Militansi ini dapat bergerak ke radikalisme dengan memadukan unsur lainnya yaitu sikap revolusioner untuk mengubah sistem. Jika keinginan untuk mengubah sistem mengalami jalan buntu, maka fase selanjutnya yaitu ekstremisme dengan menggunakan unsur kekerasan untuk mencapai tujuannya. Fase terakhir yaitu terorisme yang merupakan puncak dari aksi kekerasan dengan memadukan pemikiran dan taktik sistematis yang mendasari aksi terorisme (Hasan et al., 2013).

Konsep narasi seperti yang didefinisikan oleh Barbara Herrnstein Smith (1981) memiliki pengertian yaitu "Someone telling someone else that something happened" (Hyvärinen, 2008: 448). Analisis naratif (*narrative analysis*) yang berasal dari pendekatan konstruktivisme sosial (*social constructivism*) memberikan alat yang berguna untuk memahami cerita (*stories*). Keunggulan dari analisis naratif ini adalah tidak memperlakukan responden dalam penelitian hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga perhatian diberikan kepada cara bagaimana responden mengkonstruksikan dan menyampaikan pengertiannya tentang realitas sosial (Esin et al., 2014). Dengan bantuan pendekatan konstruktifisme sosial, studi ini memberikan perhatian serius kepada konstruksi sosial yang lebih luas dari narasi Islamisme dalam lingkup interpersonal, sosial dan hubungan budaya (politik identitas) yang dieskpresikan oleh responden dalam penelitian ini. Sehingga kemudian ini dapat memberikan pemaknaan (*meaning*) dari narasi tersebut.

### 3. Peta Narasi

Berdasarkan observasi dan temuan di lapangan, konstruksi narasi Islamisme yang

berkembang pada masyarakat Medan mengambil bentuk yang beragam. Ekspresi individu yang variatif tentang Islamisme ini memperlihatkan bagaimana subyek secara kognitif membangun pemahaman, lalu meligitimasi sikapnya terhadap mereka yang berbeda (*the others*) berdasarkan dalil teologis dan realitas yang ditemui pada tataran sosial *praxis*. Arah hilirnya adalah pada tindakan. Jika kita perhatikan lebih dalam, variasi dari respon yang muncul terhadap mereka yang berbeda terbangun atas dasar sikap oposisi binari berdasarkan perbedaan posisi dan pemahaman informan dari sang *lian* (*the others*). Sentimen atas dinamika sosial politik agama dan ekonomi turut membentuk narasi militan terhadap sang *lian* tersebut. Pelabelan terhadap *lian* seperti musuh dan *kafir* adalah manifestasi dari pola pikir yang intoleran terhadap mereka yang berbeda. Ini dapat dianggap sebagai *framing* terhadap mereka yang dianggap berbeda dengan si subjek.

#### a) Kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani

Sebagian informan dalam penelitian ini cenderung membenci Yahudi dan Nasrani yang dianggap sebagai pihak yang memusuhi Islam. Baik informan dari kalangan muda ataupun tokoh masyarakat yang mengekspresikan ketidaksukaan terhadap dua agama tersebut melegitimasi pandangannya berdasarkan Al Quran dalam *surah* Al Baqarah ayat 120 yaitu *Walan tarda 'anka alyahoodu wala alnmasara hatta tattabi'a millatahum*. Dengan sandaran teologis ini, para informan tidak saja mendeskripsikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang kafir, namun juga mengidentikkan mereka sebagai pihak yang menindas dan menjerumuskan umat Islam.

Respond dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengatakan, walaupun dia lupa teks Al Quran tersebut, bahwa "tidak akan senang agama Yahudi dan Nasrani sampai umat Islam mengikuti mereka" (Ridho Erwinsyah, wawancara, 23 Juli 2013). Hal

senada juga diungkapkan oleh Responden dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di IAIN Sumatera Utara. Menurutnya umat Yahudi adalah salah satu pihak yang memusuhi Islam (Muhammad Hafizal Ashari Purba, wawancara, 23 Juli 2013).

Responden lain yaitu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) SUMUT mendeskripsikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang kafir. Pemeluk kedua agama tersebut adalah musuh pertama orang Islam. Menurut Ketua HTI ini, penilaiannya terhadap Yahudi dan Nasrani bukanlah doktrinisasi, akan tetapi itu merupakan kepercayaannya kepada Al Quran. Responden ini menambahkan bahwa pada level domestik, ada dua masalah Kristenisasi di Indonesia yaitu pertama Kristenisasi tidak mendapatkan penanganan serius dari pemerintah. Karena negara kita berdasarkan demokrasi yang memberikan ruang bagi kebebasan beragama, maka upaya Kristenisasi yang terselubung menjadi sangat terbuka. Masalah kedua yaitu adanya hubungan antara penjajahan ideologi kapitalis dengan Kristenisasi. Berdasarkan pengetahuan yang responden peroleh, Kristenisasi atau aksi misionaris memiliki hubungan erat dengan hancurnya *daulah khilafah* (Irwan Said Batubara, wawancara, 25 Juli 2013).

Bentuk lain kebencian yang suarakan oleh para informan menyangkut pandangan mereka terhadap Zionisme dan Kristenisasi. Dalam pandangan Nursariyanto (Wawancara, 24 Juli 2013) yang merupakan Sekretaris Daerah DPD Front Pembela Islam (FPI) SUMUT, Zionisme adalah kekuatan yang harus ditantang habis-habisan agar umat Islam tidak dizhalimi oleh mereka. Menurut Nursariyanto, Zionisme berikut jaringan-jaringannya melakukan infiltrasi terhadap ulama-ulama dan cendekiawan Islam dengan tujuan untuk menghancurkan ajaran-ajaran Islam dari dalam. Ketidaksenangan FPI terhadap umat

Kristen/Nasrani lebih kepada aksi mereka dalam pemurtadan dan pembangunan gereja-gereja yang dianggapnya tidak mematuhi aturan yang ada. Nada ketidaksukaan terhadap pendirian gereja juga suarakan oleh beberapa informan. Ketua Majelis Mujahidin Pengurus Wilayah (PW) SUMUT, Zulkarnain (Wawancara, 25 Juli 2013). Dia mengeskpresikan secara negatif masifnya pendirian gereja di Sumatera Utara. Menurut pendapatnya, Baginya masifnya pendirian gereja ini dapat memicu gejolak sosial di masyarakat.

Dalam pandangan Asmuni (Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah SUMUT), Kristenisasi dan aksi misionaris yang terselubung di SUMUT dijalankan dengan mengadopsi dua taktik yaitu pertama menikahi wanita Muslim. "Orang Kristen masuk Islam terlebih dahulu, lalu setelah dia memiliki anak, orang Kristen yang telah memeluk Islam akan kembali ke agama Kristen". Yang kedua melalui pendidikan yaitu umat Islam dari kalangan yang tidak mampu akan dibiayai dan didanai oleh kelompok misionaris. Konsekwensi dari bantuan ini adalah mereka yang dibantu harus masuk Kristen (Wawancara, 27 Juli 2013).

#### **b) Penolakan terhadap Ahmadiyah dan Aliran Sesat**

Para informan yang mengekspresikan ketidaksukaan terhadap Ahmadiyah mengidentikkan kelompok ini sebagai aliran sesat. Dari kalangan muda, seorang aktivis LDK IAIN SUMUT mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap Ahmadiyah karena didasari pemahaman bahwa Ahmadiyah adalah aliran yang akan menyesatkan dan menghancurkan umat Islam. Tetapi menurut informan, tindakan yang dapat dilakukan terhadap Ahmadiyah adalah dengan cara memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam yang sesungguhnya, sebaliknya

Ahmadiyah bukannya dimusnahkan. Hal ini dikarenakan para penganut Ahmadiyah itu juga bisa menjadi objek dari dakwah Islam (Muhammad Hafizal Ashari Purba, wawancara, 23 Juli 2013).

Dari kelompok aktivis Islam garis keras, tokoh FPI, HTI dan kelompok Jama'ah Tabligh di SUMUT secara eksplisit menyatakan setuju untuk menggunakan tindakan kekerasan dalam merespon Ahmadiyah dan aliran sesat. Contohnya, Sekretaris Daerah DPD Front Pembela Islam (FPI) SUMUT menegaskan bahwa FPI telah melakukan aksi dan langkah nyata dalam menindak aliran-aliran sesat. Nursariyanto mengklaim bahwa sebelum melakukan aksi *sweeping*, FPI telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan aparat yang berwenang. Dalam respon terhadap aliran sesat, FPI berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), MUI, Kepolisian, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. "Jadi penanganan oleh FPI adalah prosedural" (Nursariyanto, wawancara, 24 Juli 2013).

Uniknya dari kalangan kelompok moderat yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al Wasliyah, dan Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) SUMUT, tanggapan terhadap keberadaan Ahmadiyah dan kelompok sesat juga disikapi dengan negatif. Pagar Hasibuan yang merupakan Ketua Muntasyar NU SUMUT terlihat risau dengan maraknya keberadaan aliran sesat di tanah air. Ia menyampaikan data dari MUI yang menyebutkan bahwa aliran sesat saat ini berjumlah puluhan. Informasi lainnya ada yang mengatakan jumlah aliran sesat mencapai lebih dari 200an (Wawancara, 26 Juli 2013). Sifat merusak yang dialamatkan kepada kelompok Ahmadiyah disuarakan oleh Daeng Malewa, Sekretaris Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) SUMUT. Informan ini mengatakan perlu aksi yang tegas terhadap Ahmadiyah (Wawancara, 26 Juli 2013). Menurut Ketua MUI SUMUT, hak

Asasi Manusia (HAM) ditengerai sebagai biang keladi dari banyaknya kemunculan aliran sesat (Abdullah Syah, wawancara, 22 Juli 2013).

### c) Sikap atas Diferensiasi Islam

Jika Ahmadiyah dipersepsikan oleh beberapa agensi sebagai aliran sesat, lain halnya Islam liberal dan Syiah. Para responden tidak mendeskripsikan Islam liberal dan Syiah sebagai aliran sesat dalam Islam, namun mereka menyikapi keduanya dengan kecurigaan, permusuhan, dan kebencian. Dalam pandangan para informan tertentu, Islam liberal dan Syiah dapat disebut sebagai diferensiasi Islam yang *profane*.

#### (1) Islam Liberal

Seorang aktivis muda dari LDK IAIN Sumatera Utara (SUMUT) menganggap Islam liberal sebagai ancaman terbesar bagi kehidupan beragama. Dalam pandangannya, Islam liberal perlu dihilangkan. Alasan yang dikemukakan oleh aktivis tersebut adalah karena jika Islam liberal berikut jaringan dan pemikirannya menyebar ke daerah-daerah yang tingkat pengetahuan agama Islamnya rendah, maka masyarakat di daerah tersebut akan mudah terkontaminasi oleh Islam liberalis ini (Muhammad Hafizal Ashari Purba, wawancara, 23 Juli 2013).

Hampir senada juga diutarakan oleh responden dari FPI SUMUT. Ia mengatakan bahwa salah satu alasan FPI terpanggil untuk mempertahankan umat Islam adalah untuk menghancurkan ideologi sekuler dan Jaringan Islam Liberal (JIL). Kelompok dan pemahaman JIL ini juga digambarkan oleh FPI sebagai salah satu problema di tengah-tengah umat Islam. Tokoh FPI SUMUT ini melihat Majelis Mujahidin adalah tempat yang cocok memperjuangkan problematika tersebut dan juga ini menjadi alasan yang bersangkutan pernah masuk dan aktif di dalam Majelis Mujahidin (Nursariyanto, wawancara, 24 Juli 2013). Dalam prisma yang sama, responden lain dari Hizbut Tahrir SUMUT mengalamatkan tuduhan kepada Jaringan Islam

Liberal dan kelompok jaringannya sebagai salah satu pihak yang merusak Islam. JIL telah melakukan *stereotyping* terhadap kelompok garis keras dengan memojokkan mereka sebagai kelompok Islam yang fundamental atau radikal, padahal apa yang diperjuangkan oleh kelompok garis keras adalah Islam (Irwan Said Batubara, wawancara, 25 Juli 2013).

## (2) Syiah

Ketua Majelis Mujahidin PW SUMUT mensinyalir bahwa saat ini ada kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan partai politik tertentu yang bertujuan untuk memusuhi agama Islam. Kekhawatiran informan ini adalah seandainya kelompok yang dimaksud menguasai negara Indonesia, maka kelompok tersebut akan menjadi sebuah ancaman sebagaimana yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada akhir era orde lama. Menurut tokoh Majelis Mujahidin ini, sekarang Syiah sudah mengarah kepada hal tersebut dengan dasar adanya elemen bangsa yang memiliki sebuah *hidden* agenda dan misi yang bertujuan ingin menguasai negara, yang tentu ini menjadi sebuah ancaman. “Ketika kebenaran di dalam demokrasi dapat diukur dengan suara terbanyak, maka peluang munculnya kelompok tersebut akan lebih besar”. Syiah dalam pandangan Ketua Majelis Mujahidin SUMUT dapat dikategorikan sebagai sebuah ancaman karena Syi’ah dalam hal ini memiliki visi untuk menyebarkan paham mereka dan melakukan revolusi terhadap negara di mana Syiah meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan yang besar di negara tersebut. “Hal ini seperti yang terjadi di Suriah dan Irak, banyak orang Sunni yang dibunuh oleh orang-orang Syiah” (Zulkarnain, wawancara, 25 Juli 2013).

## d) Islam versus Demokrasi

Ada beberapa narasi Islamisme yang menginginkan perubahan radikal terhadap

sistem politik yang ada. Salah satunya adalah narasi tentang Islam yang bertolak belakang dengan demokrasi. Misalnya aktifis dari kalangan muda yaitu informan dari LDK UNIMED mengatakan bahwa Islam dan demokrasi tidaklah sama. Namun ia mengakui untuk saat ini belum ada sistem yang relevan untuk diadopsi oleh Indonesia selain demokrasi. Ambiguitas terlihat dari respon aktivis LDK ini yaitu satu sisi aktifis LDK ini mengakui bahwa demokrasi adalah sistem yang paling baik dengan Islam dibandingkan sistem kediktatoran yang melarang berdakwah. Di sisi yang lain aktivis LDK ini mengatakan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam karena tidak berakar kepada Al Quran (Ridho Erwinsyah, wawancara, 23 Juli 2013).

Dari kalangan tokoh dan gerakan Islamis, narasi Islam *versus* demokrasi terlihat lebih radikal dibandingkan ekspresi dari kaum muda. Ismed Nur Muhammad Ali Ismah alias Abu Mu’awiyah Muhammad Ali Ismah Al Medani dari Yayasan Wakaf Al Muhajirin (Wawancara, 28 Juli 2013) yang mengklaim dari aliran sunni salafi mengatakan bahwa sistem Indonesia saat ini belum Islami. Ia menuding bahwa demokrasilah yang menjadi masalah belum bisa ditegakkannya negara Indonesia kepada sistem yang ideal. Ia secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya dengan sistem demokrasi bahwa suara satu orang nilainya sama dengan suara orang lain. Ia memberikan ilustrasi retorik bahwa dengan demokrasi maka suara kyai atau *ustaz* bernilai sama dengan suara pelacur. Maka, menurutnya, demokrasi adalah permainan yg dipaksakan kepada kaum muslimin.

Penolakan yang radikal terhadap demokrasi juga disampaikan oleh tokoh Hizbut Tahrir SUMUT. Ia mengatakan realitasnya bahwa demokrasi adalah sistem yang gagal. Ia kecewa terhadap penggulingan mantan Presiden Mesir, Muhammad Mursi, dari posisi Presiden. Inilah paradox demokrasi padahal

Mursi dipilih sebagai Presiden Mesir melalui sistem demokrasi, namun kemudian ia dijatuhkan juga secara tidak legal dalam sistem demokrasi. Menurutnya, ada kepentingan Amerika Serikat dibalik penggulingan mantan Presiden Mursi tersebut. Tokoh HTI ini juga meyakini bahwa sistem politik di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan Islam karena sistem politik di negara ini menggunakan sistem demokrasi. Ketidaksetujuannya terhadap model demokrasi politik dengan suara terbanyak karena adanya unsur kepentingan partai dan penguasa. Ia melihat tidak satupun partai yang pro rakyat sebagaimana ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak/bbm (Irwan Said Batubara, wawancara, 25 Juli 2013).

#### e) Penerapan Syariah Islam dan Pendirian Negara Islam

Perlunya penerapan syariah Islam dan negara Islam direspon beragam oleh para responden di Medan. Informan yang muda cenderung lebih lunak dibandingkan responden yang lebih tua dalam merespon penerapan syariah dan pendirian negara Islam untuk mengganti sistem yang berlaku saat ini di Indonesia. Misalnya respon dari LDK Universitas Negeri Medan/UNIMED setuju jika Indonesia menerapkan syariah Islam. Tetapi menurutnya perlu dicari cara yang baik untuk sampai pada sistem syariah. Hukum *rajam* dapat ditawarkan dalam sistem demokrasi, “jika diterima Alhamdulillah, jika tidak ya tidak apa-apa”. Baginya yang penting mereka yang menghendaki penerapan syariah Islam harus terlebih dulu masuk ke dalam sistem (Ridho Erwinsyah, wawancara, 23 Juli 2013).

Dari kalangan Islam garis keras, tokoh FPI SUMUT memberikan saran bahwa jika Indonesia belum menerapkan syariat Islam, umat Islam sebaiknya menyuarakan aspirasi ke pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah (perda) syariah. Menurutnya, seperti baru-baru ini FPI telah melakukan *judicial*

*review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan Keputusan Presiden yang membolehkan peredaran miras. Sehingga jika ada perda-perda pelarangan miras, maka syariah Islam bisa ditegakkan. Dibandingkan jika langsung merubah menjadi negara Islam, FPI lebih menyukai Indonesia berbentuk NKRI bersyariah, yaitu menciptakan terlebih dahulu masyarakat Islam. Setelah masyarakat Islam terbentuk dan perda syariah sudah ada, maka itu bisa saja secara otomatis akan tercipta negara Islam yang tetap menghargai agama lain (Nursariyanto, wawancara, 24 Juli 2013).

Responden lain yaitu tokoh Majelis Mujahidin SUMUT mengharapkan syariat Islam dapat dijadikan hukum formal di lembaga negara. Menurutnya, syariat Islam telah ada sejak era Belanda seperti hukum waris dan sekarang ini ada perbankan syariah. Tokoh MMI ini merujuk pada sejarah di mana Rasulullah dulu menyampaikan dakwahnya sesuai dengan syariat Islam melalui hukum formal, karena beliau sendiri adalah pemimpin. Kemudian jika hal ini diimplementasikan ke Indonesia yang belum menerapkan syariat Islam, maka tokoh MMI ini berpendapat bahwa dakwah untuk menerapkan syariat Islam ini harus tetap dilakukan. ia mengklaim bahwa dakwah Majelis Mujahidin adalah bagaimana negara bersyariah bisa diterapkan di Indonesia. “Penerapan syariah Islam juga adalah agenda MMI berikut tahapan-tahapannya menuju negara yang bersyariah Islam (Zulkarnain, wawancara, 25 Juli 2013).

Di lain sisi, responden lain yang merupakan tokoh Laskar Jihad SUMUT menolak anggapan bahwa pemerintahan saat ini adalah *thogut*, “itulah mengapa teman-teman lama itu (kelompok Islam garis keras lainnya) tidak sejalan lagi atau benci dengan kita”. Mantan anggota Laskar Jihad di Ambon ini menuding bahwa Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT)<sup>2</sup> Medan yaitu jamaah Abu Bakar Ba’asyir lah yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam dengan kekerasan.<sup>3</sup>

Penolakan tokoh sunni salafi di Medan ini terhadap pendirian negara Islam didasari pandangan bahwa jika “pemimpin kita masih sholat, syiar-syiar Islam masih ditegakkan di negeri ini”. Dalam pandangan informan, Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara Islam jika pemimpinnya itu Muslim, sholat tidak dilarang, dan syiar-syiar Islam masih bisa berjalan di Indonesia (Ismed Nur Muhammad Ali Ismah, wawancara, 28 Juli 2013).

#### f) Ekstremisme

Narasi ekstremisme ditandai dengan penekanan terhadap penggunaan kekerasan sebagai satu-satunya cara yang ditempuh untuk merealisasikan perubahan politik atau juga dengan pemilihan taktik kekerasan sebagai respon karena ketidaksabaran menunggu perubahan. Ekstremisme diekspresikan beragam oleh para informan/responden. Narasi ekstremisme yang dimaksud mencakup pandangan dan sikap (termasuk dukungan dan respon yang permisif) yang pro terhadap satu kelompok Islam dalam melakukan aksi-aksi kekerasan seperti dengan melakukan penutupan paksa/*sweeping* terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti gereja, aliran sesat, dan tempat maksiat. Kemudian juga bagaimana informan menggunakan legitimasi untuk mendukung tindakan kekerasan. Ekstremisme di Medan Sumatera Utara juga terekam dengan aksi dan tindakan kekerasan seperti melakukan aksi *sweeping* yang dimaksud.

Aksi-aksi penutupan paksa/*sweeping* merupakan tindakan yang secara jelas dan nyata dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di Sumatera Utara. Sebagaimana yang diklaim oleh Sekretaris Daerah DPD Front Pembela Islam (FPI) Sumatera Utara, aksi tersebut merupakan bagian dari dakwah. Menurutnya, ketika FPI melakukan aksi seperti menindak aliran-aliran sesat dan usaha-usaha untuk menutup tempat maksiat itu semua

mempunyai prosedur. Tokoh FPI ini mengklaim bahwa selama ini FPI berkoordinasi dengan aparat yang berwenang. Alasan informan bahwa *sweeping* yang terjadi selama ini seperti di Sumatera Utara adalah karena ketidaktegasan aparat pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kepolisian terhadap tempat-tempat maksiat. Karena alasan tersebut, maka masyarakat sendiri yang menutup tempat maksiat tersebut (Nursariyanto, wawancara, 24 Juli 2013).

Dukungan dan simpati terhadap aksi FPI datang dari tokoh Majelis Mujahidin Sumatera Utara. Ia menyampaikan pertanyaan retorik yaitu negara Indonesia yang berdasarkan hukum, tetapi mengapa tempat-tempat hiburan tidak ditertibkan. Sehingga ini dalam pandangan tokoh MMI SUMUT bahwa aksi *sweeping* seperti yang dilakukan oleh FPI berangkat dari perasaan tidak adil di masyarakat. Aksi *sweeping* juga terjadi karena pemerintah lemah dan tidak tegas untuk menegakkan Undang-Undang dan perda-perda anti maksiat. Ironisnya pemda memiliki satpol PP. Situasinya kemudian digambarkan oleh tokoh MMI ini sebagai hukum rimba yaitu ketika pemerintah tidak bisa menertibkan dan itu mengganggu umat Islam, situasi ini mendorong FPI untuk beraksi. Menurut Ketua Majelis Mujahidin SUMUT ini, dakwah tidak bisa berjalan tanpa adanya kekuatan. Maka dari itu, agar dakwah dapat terus berjalan, Majelis Mujahidin “...perlu memperkuatnya dengan adanya laskar sebagai suatu (bentuk) tekanan, semacam nilai tawar, jika suatu saat dakwah mendapat tantangan” (Zulkarnain, wawancara, 25 Juli 2013).

Sikap memaklumi atas aksi *sweeping* sepanjang tidak diarahkan terhadap gereja terlihat dari respon responden yang berasal dari kalangan Islam moderat, namun dengan perbedaan tingkatan dukungan dan responnya terhadap objek dari aksi tersebut. Ali Murthado dari GP (Gerakan Pemuda) Anshor SUMUT

(Wawancara, 24 Juli 2013) memaklumi bahwa aksi *sweeping* yang dimaksud terjadi karena himbuan kelompok seperti FPI tidak dijalankan. Karena penegakan hukum tidak dijalankan, maka kelompok garis keras bertindak melakukan aksi anarkis. “Sebenarnya *sweeping* itu boleh sepanjang tidak dilakukan dengan kekerasan”.

Namun respon tegas yang menolak aksi *sweeping* datang dari kalangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan MUI Sumatera Utara. Ketua Muntasyar NU SUMUT menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi kekerasan dan *sweeping*. Menurut tokoh NU SUMUT ini, FPI tidak punya kewenangan untuk melakukan *sweeping*, karena Polisi lah yang memiliki kewenangan itu. “Kalau mau, daftar saja anggota FPI untuk menjadi Polisi. Sebagaimana main bola, silahkan ikut menjadi pemain karena penonton tidak bisa ikut bermain” (Pagar Hasibuan, wawancara, 26 Juli 2013). Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Penolakan informan terhadap aksi *sweeping* disebabkan adanya “*mudhorot* yang ditimbulkan dari aksi kekerasan”. Baginya, aksi *sweeping* “...bukan dakwah *hikmah wal mauizhotil hasanah*” (Asmuni, wawancara, 27 Juli 2013). Nada yang sama juga datang dari Ketua MUI wilayah Sumatera Utara yang merespon negatif aksi-aksi penutupan paksa terhadap aliran sesat dan tempat maksiat atau sejenisnya (Abdullah Syah, wawancara, 22 Juli 2013).

#### g) Terorisme

Secara umum, narasi terorisme tidak mendapat respon positif dari seluruh informan. Hanya saja ada responden yang menolak secara tegas bahwa terorisme bertentangan dengan Islam, tetapi ada juga yang bisa memahami mengapa terorisme terjadi. Yang terakhir ada batasan menyangkut dukungan dan konteks di mana aksi terorisme dapat ditempuh. Adapun

konsep jihad dan mati syahid, para informan mendeskripsikan secara beragam.

FPI tidak bisa menerima tindakan terorisme seperti yang terjadi di SUMUT yaitu membobol bank kemudian membunuh aparat, termasuk juga upaya untuk tujuan *fa'i* dan untuk mempersenjatai diri. Menurutnya, tindakan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Namun dalam konteks perang di Ambon dan Poso yang lalu, jihad dan mati syahid dapat dilakukan karena ketidaktegasan pemerintah terhadap kezhaliman-kezhaliman yang terjadi termasuk adanya pembantaian terhadap umat Islam di Ambon dan Poso. Dalam konteks ini ada justifikasi menempuh mati syahid di sana untuk tujuan membela saudara-saudara muslim. Akan tetapi secara umum, menurut tokoh FPI ini Indonesia bukanlah negara konflik (bukan *darul harb*) yang sifatnya menimbulkan peperangan (Nursariyanto, wawancara, 24 Juli 2013).

Alasan penolakan terhadap aksi terorisme seperti yang dilakukan oleh Amrozi cs disampaikan secara tegas oleh Ketua Majelis Mujahidin Sumatera Utara. Penolakan ini lebih disebabkan oleh tidak jelasnya alasan membunuh orang lain yang dilakukan oleh Amrozi cs. Tokoh MMI SUMUT ini melegitimasi pandangannya berdasarkan Al Quran bahwa ada larangan membunuh tanpa alasan yang hak yaitu alasan yang *syar'i*. Kalau kita ingin memerangi negari orang kafir, maka harus ada dulu pengumuman terlebih dahulu bahwa kita akan menyerang mereka. Jadi dalam pandangan tokoh Majelis Mujahidin SUMUT ini, membunuh melalui jalan jihad itu diperbolehkan sepanjang tindakan itu diarahkan ke negara orang *kafir* yang memerangi orang Islam. “Kita hanya boleh memerangi orang kafir apabila mereka memerangi kita” (Zulkarnain, wawancara, 25 Juli 2013).

#### 4. Pola Penyebaran Narasi

Polarisasi penyebaran narasi Islamisme di Medan mengambil bentuk yang beragam. Lanskap sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang heterogen dan dinamis ditambah dengan konstelasi dalam dinamika lokal, nasional, dan internasional turut memberikan ruang dalam memfasiliasi transmisi Islamisme kepada seseorang melalui berbagai saluran. Sentimen emosional dan ketertarikan terhadap sebuah gerakan dan cara pandang yang memikat menjadi pintu masuk untuk kemudian orang tersebut terdorong untuk melakukan pencarian keagamaan. Pola penyebaran narasi yang teridentifikasi di Medan adalah sebagai berikut.

**Pertama** adalah media (komunikasi) yang mencakup media cetak, elektronik, dan online, bulletin, majalah, selebaran, dan blog. Media online merupakan media favorit bagi aktivis LDK untuk menambah pengetahuan umum dan keagamaan. Ridho Erwinsyah dari LDK Universitas Negeri Medan mengatakan sering mengakses [www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com), facebook dan TV One untuk menambah pengetahuan keagamaan dan umum. Media dakwatuna disinyalir banyak membentuk narasi Islamisme dari Ridho. Adapun informan lainnya yaitu Ismed Nur Muhammad Ali Ismah yang merupakan mantan anggota Laskar Jihad sering mengunjungi website [www.salafy.or.id](http://www.salafy.or.id) dalam menambah pengetahuan agamanya. Misalnya di website salafy ini ada fatwa-fatwa seperti bunuh diri bukanlah berjihad. Namun juga ada *uzur* yang mana sebagian ulama salafi menganggap mereka yang melakukan bom bunuh diri bukan termasuk Muslim dengan alasan jika mereka (pelaku bom bunuh diri) melakukan itu karena putus asa dan menganggap tidak ada cara lain kecuali itu, mereka bisa dianggap putus asa, sedangkan putus asa ini membawa *kekufuran*.

Kemudian informan lainnya yaitu tokoh Hizbut Tahrir SUMUT sering mengunjungi website <http://hizbut-tahrir.or.id/> di samping juga membaca bulletin HTI tiap minggu, atau

bulletin bulanan HT *al Wa'i*. Dari sini terlihat dengan keterbukaan akses informasi dan kebebasan media, setiap gerakan Islam memiliki websitenya sendiri-sendiri dalam rangka menyebarkan informasi dan menjadi media komunikasi yang sejalan dengan pandangan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya bulletin dakwah dan majalah juga menjadi media dalam menyebarkan narasi. Hizbut Tahrir dalam Buletin Dakwah Al-Islam, edisi 657 mengangkat narasi demokrasi yang dianggap sebagai sistem gagal dan merusak (Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 2013).

Buletin Jum'at Mujahidin dalam edisi 128 mendeskripsikan Indonesia adalah negara yang terpuruk yang perlu pemimpin yang taat syariah (Lajnah Perwakilan Wilayah Majelis Mujahidin Sumatera Utara, 2012). Majalah versi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam edisi 15 melemparkan kritik pedas bahwa telah terjadi radikalisme negara yang mengancam agama. Narasi ini menuding bahwa hegemoni nasionalisme sekuler dalam perpolitikan nasional selama ini adalah penyebab utama terpinggirkannya peran agama dalam mengelola negara (Majelis Mujahidin, 2008).

Pola penyebaran **kedua** adalah hubungan interpersonal yang dapat berupa hubungan keluarga, guru dan teman/sahabat. Ketua DPD Hizbut Tahrir SUMUT dulunya memilih HT berawal dari ajakan seniornya untuk bergabung dalam HT. Hubungan interpersonal ini kemudian berkelindan dengan fenomena di kampus-kampus non agama yang mana dulunya informan kuliah di Fakultas Teknik Mesin di Institut Teknologi Medan. Menurut tokoh HTI SUMUT ini, di kampus teknik, masjid adalah tempat pergerakan (Wawancara, 25 Juli 2013).

Sedangkan pengalaman interpersonal dari Ismed Nur Muhammad Ali Ismah (Wawancara, 28 Juli 2013) yang merupakan jebolan Laskar Jihad dan pernah ikut berperang di Ambon,

orang tuanya suka dengan tokoh Kartosuwiryo. Ayahnya juga memiliki ketertarikan terhadap Muhammadiyah garis keras ketika mengaji di Masjid Al Jihad. Hubungan interpersonal gurumurid yang banyak mempengaruhi tokoh sunni salafi di Medan ini dalam konstruksi narasi Islamisme. Ismed dulu pernah masuk kelompok Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar dari Pondok Pesantren Ngruki Solo. Berdasarkan dari beberapa referensi kajian terorisme (e.g. Rashwan (ed.), 2007; Barton, 2005; Fealy dan Borgu, 2005), Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar adalah dua tokoh penting dalam Jaringan Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara. Keduanya pernah terlibat dalam jaringan Darul Islam-NII. Pesantren Ngruki juga didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Keduanya terlibat aktif dalam pergerakan Jamaah Islamiyah pada era tahun 1980an dan kemudian keduanya pernah kabur dan bersembunyi di Malaysia.

Pola penyebaran **ketiga** yaitu ruang atau *setting* sosial yang meliputi kegiatan pengajian dan khalaqah. Narasi Islamisme yang ditransmisikan melalui ruang ini cenderung lebih leluasa karena sifatnya yang eksklusif dan privat. Muhammad Hafizal Ashari Purba dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) IAIN Sumatera Utara mengatakan bahwa pengetahuan tentang keagamaannya banyak diperoleh melalui berbagai agenda pengajian yang diselenggarakan oleh LDK (Wawancara, 23 Juli 2013).

Dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), pengayaan pengetahuan agama dilaksanakan melalui berbagai kegiatan khususnya bentuk muzakarah, khalaqah, dan forum untuk kajian-kajian tentang Islam bagi pengurus MMI yang diadakan sebanyak dua kali dalam setahun. Menurut Ketua MMI SUMUT (Wawancara, 25 Juli 2013), dalam kegiatan-kegiatan ini dilakukan berbagai kajian-kajian yang menurutnya ilmiah. Pentingnya ruang dan *setting* sosial juga memberikan pengaruh terhadap Ketua HTI

SUMUT. Informan ini mengatakan bahwa pengetahuan agamanya diperoleh melalui pengajian-pengajian intensif atau khalaqah. Khalaqah-khalaqah yang ada di HT merupakan materi-materi yang diadopsi oleh HT untuk dikaji dalam internal HT (Wawancara, 25 Juli 2013).

## 5. Pola Penerimaan Narasi

Ketika terjadi transmisi narasi Islamisme, seseorang mengalami proses kognitif untuk menerima ataupun menolak narasi Islamisme ini yang tersebar baik dalam ruang publik ataupun ruang privat yang eksklusif. Adanya keinginan terhadap sesuatu yang ideal menjadi pintu masuk bagaimana narasi Islamisme tersemai dan mengalami internalisasi dalam diri seseorang. Ini juga yang kemudian mendorong terbentuknya pandangan, sikap, dan akhirnya tindakan seseorang. Proses penerimaan tidaklah terlihat kaku, tetapi ia dinamis bahkan dapat mengandung unsur manipulatif. Ada tahapan di mana subyek penelitian menerima narasi Islamisme setelah melihat kekacauan sistem dan perubahan sosial yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh agensi. Juga, tahapan yang dimaksud tidaklah bersifat hirarki, melainkan cenderung berfase dinamis. Narasi ini dapat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain menyesuaikan konteks dan situasi internal dan eksternal dari informan, berikut juga adanya kontribusi dari variabel lain yang menyertainya. Perpindahan pada fase ini dapat berlangsung cepat ataupun perlahan. Pada bagian ini akan diidentifikasi apa saja pola penerimaan narasi Islamisme dan di mana posisi informan/responden dalam peta narasi yang muncul.

### a) Kesadaran tentang Kekacauan Dunia dan Sistem yang Berlaku di Masyarakat

Pola penerimaan ini menjelaskan adanya usaha seseorang untuk membangun de-legitimasi atau ketidakpercayaan terhadap sistem dan tatanan yang ada di masyarakat baik lokal, domestik, dan global. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Hizbut Tahrir Sumatera Utara bahwa umat Islam saat ini tidak hidup dalam Islam. Mereka mengalami berbagai kerusakan dari mulai sisi akidah sampai tata pergaulan. Menurut tokoh HT SUMUT ini, kerusakan ini tidak saja dirasakan oleh umat Islam tetapi juga oleh umat non Muslim. Penyebab kerusakan dan kekacauan di dunia ini adalah kehidupan kapitalis dan sekulerisme yang merupakan sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Hizbut Tahrir menegaskan bahwa “sistem kapitalis dan sekulerisme ini harus dihilangkan dari muka bumi”.

Menurut tokoh HT SUMUT ini, ideologi kapitalis dan sistem sekulerisme telah menjadikan sendi-sendi umat Islam itu hancur hingga pada tatanan kehidupan rumah tangga sekalipun. Mendidik dan membesarkan anak tidak lagi berdasarkan sistem Islam, tetapi dengan sistem sekuler. Pemerintah dituding bukannya menjadikan Indonesia keluar dari cengkaman liberalisme ekonomi, tetapi justru menjadikan cengkaman liberalisme ini makin kuat. Hubungan saling menopang antara sekulerisme dan demokrasi juga makin mengacaukan sistem di Indonesia. Sama halnya dengan sekulerisme, demokrasi juga menjadikan manusia menjadi tolak ukur dalam menentukan kebaikan dan keburukan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa HT memusuhi demokrasi. Dalam pandangan tokoh HT Sumatera Utara ini “demokrasi itu sendiri faktanya telah menghancurkan negara Indonesia. Padahal Indonesia ini selamat jika syariat Islam diterapkan” (Wawancara, 25 Juli 2013).

#### **b) Perbedaan Identitas berlandaskan Sentimen Agama**

Kontestasi identitas berdasarkan sentimen agama terlihat jelas dalam memilih pemimpin non Muslim. Di Medan, penolakan terhadap pemimpin yang beragama non Islam beresonansi kuat dengan dinamika politik identitas pada tataran lokal dengan mengadopsi sentimen agama. Pola penerimaan narasi Islamisme memperlihatkan adanya persinggungan antara identitas, politik, dan agama dalam mewujudkan agenda atau mengekspresikan keinginan politik tertentu. Misalnya, seorang aktivis LDK Universitas Negeri Medan secara tegas menolak kepemimpinan non muslim. Jika dilihat dari politik lokal, menurutnya pertarungan politik identitas di Sumatera Utara nampak dalam kontestasi pertarungan antar marga Islam dan Kristen (Ridho Erwinsyah, wawancara, 23 Juli 2013).

Penolakan keras terhadap pemimpin non Islam datang dari tokoh HT SUMUT. Ia berpendapat bahwa “dalam konsep Islam, memilih pemimpin non Islam itu tidak boleh”. Namun ia menyesalkan karena kita hidup bukan dalam sistem Islam, maka non Muslim bisa memimpin. Tokoh HT ini mengkritisi bahwa pangkal masalah yang memungkinkan dipilihnya pemimpin non Islam adalah demokrasi (Irwan Said Batubara, wawancara, 25 Juli 2013). Penolakan keras lainnya datang dari Ketua MMI Sumatera Utara. Responden ini mengklaim bahwa Presiden non Muslim bertentangan dengan Undang-Undang karena telah dijelaskan bahwa “Presiden Indonesia adalah penduduk asli Indonesia yang beragama Islam” (Zulkarnain, wawancara, 25 Juli 2013).

#### **c) Frustrasi terhadap Lambannya Perubahan**

Penerimaan narasi ekstremisme dapat masuk ketika agensi merasa putus asa terhadap lambannya perubahan yang diinginkannya.

Setelah kemudian agensi percaya tentang keharusan untuk memperbaiki situasi yang tidak sesuai dengannya. Perasaan frustrasi ini yang berakumulasi dengan ketidaksabaran agensi menunggu perubahan yang diinginkannya dapat mendorong agensi pada tindakan menggunakan kekerasan dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan Islamis yang diinginkan oleh agensi atau kelompoknya. Dalam kasus di Medan, tindakan menggunakan kekerasan ini tidak terlalu termobilisasi secara terorganisir dan sistematis. Juga, ekstremisme dengan penggunaan kekerasan ini tidak masif, melainkan dengan metode yang sederhana dan terkesan terbatas. Perlu ditambahkan bahwa adanya variabel tentang misi dan tujuan perjuangan yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok Islamis lainnya memberikan nuansa yang kurang konsolidatif dan solid antara mereka. Walaupun demikian, satu kelompok Islamis dapat memberikan simpati terhadap penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras lainnya.

Frustrasinya FPI terhadap lambannya respon dari aparat dan pemerintah daerah dalam menindak tegas tempat-tempat maksiat, perzinahan, prostitusi, minuman memabukkan dan yang sejenisnya mendorong FPI untuk mengambil tindakan sendiri untuk merubah keadaan yang diinginkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh FPI Sumatera Utara, FPI telah melakukan empat kali teguran untuk menutup tempat-tempat maksiat tersebut. Akhirnya FPI bersama masyarakat melakukan aksi anarkis, pengrusakan tempat tersebut. “Ini adalah reaksi karena tidak ada aksi dari Kepolisian” (Nursariyanto, wawancara, 24 Juli 2013). Hal ini menggambarkan adanya legitimasi bagi FPI untuk bertindak dengan caranya sendiri karena usahanya selama ini yang kooperatif dengan memberikan teguran yang berulang kali kepada aparat terkait untuk menindak tempat-tempat maksiat tidak dihiraukan dan tidak mendapat respon.

Di samping justifikasi sosiologis, justifikasi teologis juga dipakai oleh FPI sebagai sandaran mengapa FPI mengambil tindakan kekerasan. Pembeneran teologis ini bersumber dari pengetahuan agama informan. Menurutnya, “dalam Islam, setiap ada kemungkaran dan apabila umat Islam membiarkannya, maka Allah pasti akan menurunkan *bala*. Karena kita tidak ingin *bala* ini diturunkan dan kita juga tidak ingin generasi kita pada masa mendatang melakukan kerusakan-kerusakan, maka kita meminta aparat pemerintah untuk menindak tegas hal-hal demikian”. Sehingga berdasarkan dua legitimasi di atas, maka kemudian FPI mendapat pembeneran untuk melakukan aksi menutup paksa/*sweeping* dengan menggunakan kekerasan terhadap tempat-tempat maksiat tersebut karena lamban dan tidak jelasnya perubahan yang diinginkan.

## 6. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diulas di atas, konstruksi narasi Islamisme tidaklah berdiri sendiri, namun ia berkembang melalui pengalaman dan trajektori seseorang dalam interaksi sosial. Keragaman narasi-narasi Islamisme ini tidak terlepas dari berbagai faktor dan konteks yang melingkupi agensi. Kondisi sosio demografis, budaya, ekonomi dan politik turut mempengaruhi bagaimana individu menerima dan membangun narasi. Sebagaimana diulas di atas, masyarakat Medan memiliki karakteristik sebagai masyarakat yang multi etnik yang mana tidak ada kelompok etnik tertentu yang dominan. Ini bisa menimbulkan dua implikasi yaitu masing-masing etnik akan berada dalam situasi saling bergantung dan bisa munculnya kelompok atau individu yang ingin mempertegas identitas, terlebih jika itu dihadapkan pada kontestasi ekonomi dan politik lokal.

Konstruksi narasi Islamisme yang ditemukan di Medan terdiri dari narasi militan

terkait kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani, ketidaksukaan terhadap Ahmadiyah dan aliran sesat, dan ketidaksenangan terhadap Islam liberal dan Syiah. Narasi radikalisme yang terbalut dalam *framing* antagonis mencakup Islam *versus* demokrasi, dan penerapan syariah Islam dan pendirian negara Islam *versus* sistem yang berlaku saat ini di Indonesia. Narasi ekstremisme terbangun tidak saja pada pandangan yang pro dan simpati terhadap penggunaan kekerasan, namun juga termanifestasikan pada tindakan penyerangan dengan menggunakan kekerasan terhadap kelompok masyarakat lainnya. Terakhir, walaupun secara umum narasi terorisme kurang mendapat tempat dalam masyarakat Medan yang ini ditandai dengan penolakan terhadap aksi teroris, namun narasi terorisme muncul dalam narasi perang jihad dan mati syahid yang diperbolehkan dalam kasus di Ambon dan di Poso, serta situasi perang seperti di Afghanistan dan di Palestina.

Polarisasi penyebaran narasi Islamisme di Medan setidaknya difasilitasi oleh tiga saluran. Penyebaran pertama adalah melalui media komunikasi yang meliputi media cetak, elektronik, dan online, bulletin, majalah, selebaran, dan blog. Bulletin dakwah dan majalah juga menjadi media dalam penyebaran narasi, seperti Hizbut Tahrir dengan Buletin Dakwah Al-Islam, dan MMI dengan buletin Jum'at Mujahidin dan majalah Risalah Mujahidin. Transmisi Islamisme kedua yaitu melalui pola hubungan interpersonal dari keluarga, guru-murid, dan teman/sahabat. Dalam kasus di Medan, hubungan anak-bapak, pertemanan dan relasi junior-senior, dan guru-murid terlihat jelas dalam mempengaruhi bagaimana narasi itu tersebar. Pola penyebaran ketiga terjadi melalui pengajian dan khalaqah. Transmisi melalui ruang yang semi privat ini terlihat dapat memberikan kedekatan psikologis dan membangun kebersamaan yang kuat ketika menyebarkan narasi.

Pola penerimaan narasi mendorong terbentuknya pandangan, sikap, dan akhirnya tindakan seseorang. Pola penerimaan Islamisme yang terekam di Medan mencakup setidaknya tiga fase yang non hirarki. Pola pertama yaitu kesadaran tentang kekacauan dunia dan sistem yang berlaku di masyarakat. Pola kedua adalah adanya perbedaan identitas yang berlandaskan sentimen agama. Pada pola ini, penolakan terhadap pemimpin yang beragama non Islam beresonansi kuat dengan dinamika politik identitas yang dieksploitasi dengan sentimen agama. Sehingga ini memperlihatkan adanya interaksi manipulatif antara identitas, politik, dan agama yang dieksploitasi demi terwujudnya agenda atau keinginan politik seseorang atau kelompok. Pola penerimaan terakhir menyangkut adanya frustrasi terhadap lambannya perubahan yang ini memicu untuk mengambil tindakan sendiri di luar hukum yang berlaku.

### Daftar Pustaka

- Barton, Greg. 2005. *Jemaah Islamiyah: Radical Islamism in Indonesia*. Singapore: Singapore University Press.
- Chalk, Peter, Angel Rabasa, William Rosenau, dan Leanne Piggott. 2009. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment*. The RAND Corporation.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 1976. *Monografi Daerah Sumatera Utara*, Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Esin, Cigdem, Fathi, Mastoureh, and Squire, Corinne. 2014. *Narrative Analysis: The Constructionist Approach*, dalam Uwe Flick, *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Ltd.
- Fealy, Greg dan Aldo Borgu. 2005. *Local Jihad: radical Islam and terrorism in*

- Indonesia. The Australian Strategic Policy Institute.
- Hasani, Ismail (ed.). 2009. *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: Publikasi SETARA Institute.
- Hasan, Noorhaidi, Bertus Hendriks, Floor Janssen dan Roel Meijer. 2012. *Counter Terrorism Strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
- Hasan, Noorhaidi, M. Iqbal Ahnaf, Syaifudin Zuhri dan Maufur. 2013. *Instrumen Penelitian Narasi dan Politik Identitas: Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 2013, Mei. "Demokrasi: Sistem Gagal dan Merusak", Buletin Dakwah Al-Islam, edisi 657.
- Hyvärinen, Matti. 2008. *Analyzing Narratives and Story-Telling*, dalam Pertti Alasuutari, Leonard Bickman dan Julia Brannen, *The SAGE Handbook of Social Research Methods*. SAGE Publications Ltd.
- International Crisis Group (ICG). 2010, 6 Juli. "Indonesia: The Dark Side of Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT)", International Crisis Group Asia Report No. 107.
- \_\_\_\_\_. 2012, 16 Juli. "Bagaimana Kelompok Ekstrimis Membentuk Kelompok Baru", International Crisis Group Asia Report No. 228.
- Lajnah Perwakilan Wilayah Majelis Mujahidin Sumatera Utara. 2012, Desember. "Dicari Pemimpin Taat Syari'ah", Buletin Jum'at Mujahidin, edisi 128.
- Majelis Mujahidin. 2008, 15 Desember 2007-15 Januari. "Radikalisme Negara Mengancam Agama", Risalah Mujahidin, edisi 15.
- Mozaffari, Mehdi. 2007. "What is Islamism? History and Definition of a Concept", *Totalitarian Movements and Political Religions*, Vol. 8, No. 1, 17–33.
- Pelly, Usman, 2004. *Pengaruh Modernisasi terhadap Adat dan Budaya di Sumatera Utara*, dalam *Pelestarian Adat Masyarakat Etnik Sumatera Utara*. Medan: Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat Sumatera Utara (FORKALA), cetakan pertama.
- Rashwan, Diaa (ed.). 2007. *The Spectrum of Islamist Movements*, vol. 1. Berlin: Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies and the Friedrich-Ebert-Stiftung.

---

<sup>1</sup> Studi ini merupakan bagian dari penelitian mengenai "Narasi dan Politik Identitas: Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme di Indonesia" yang dilaksanakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

<sup>2</sup> Banyak pengamat teroris mengklasifikasikan Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT) sebagai aliran salafi jihadi. Baca juga International Crisis Group (ICG). 2010. "Indonesia: The Dark Side of Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT)", International Crisis Group Asia Report No. 107.

<sup>3</sup> Berbeda dengan JAT yang dianggap oleh informan sebagai kelompok garis keras, Majelis Mujahidin Indonesia sebaliknya dianggapnya sebagai kelompok yang halus.